

**"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"**

TESIS

Oleh :

Devi Novita Sari
1421021002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI (MIE)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

Abstract

The Effect of Government Spending and Labor on Economic Growth in Central Lampung District

by

Devi Novita sari

This study aims to analyze the effect of government spending and labor on economic growth in Central Lampung District. This study uses, method of quantitative analysis with the model of statistic center in Central Lampung year 2000-2014, that is government spending and labor on economic growth in central lampung district.

The results showed government spending on direct spending have a positive effect but not significant to economic growth and on indirect spending have a positive effect and significant to economic growth. Labor has a positive effect and significant to economic growth.

Suggestion in this study are expected that local government of Central Lampung is reviewing the allocation of regional expenditure and expected local government of Central Lampung is improving the quality of labor, for example by increasing entrepreneurship education through non-formal channels.

Keywords : Government Spending, Labor, Economic Growth.

Abstrak

"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"

oleh

Devi Novita Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan model regresi berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik Lampung Tengah Tahun 2001 - 2014, yaitu berupa pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Lampung Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah pada belanja langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pada belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Saran dalam penelitian ini adalah di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokasi pengeluaran daerah dan di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meningkatkan kualitas tenaga kerja, misalnya dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.

Kata-kata kunci : Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi.

**"PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH"**

Oleh

Devi Novita Sari

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER EKONOMI**

Pada

**Jurusan Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

Judul Tesis

**: PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN TENAGA KERJA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa

: Devi Novita Sari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1421021002

Jurusan

: Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas

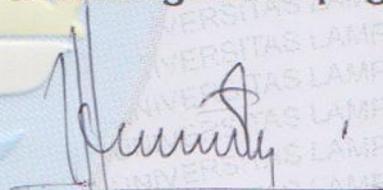
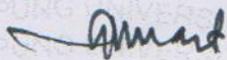
: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



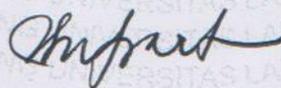
Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.

M. Husaini, S.E., M.Si.

NIP 19560325 198303 1 002

NIP 19601220 198903 1 004

2. Ketua Jurusan Magister Ilmu Ekonomi



Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.

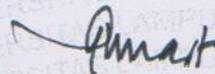
NIP 19611209 198803 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

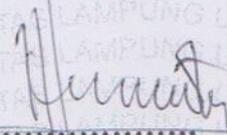
Ketua

: **Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.**



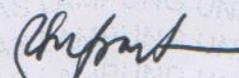
Sekretaris

: **M. Husaini, S.E., M.Si.**



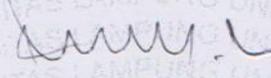
Penguji Utama

: **Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.**

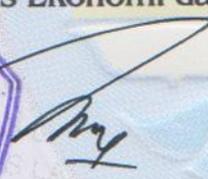


Penguji Kedua

: **Dr. Saimul, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hl. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : **04 Mei 2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tesis ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman sanksi sesuai peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 04 Mei 2017

Penulis



Devi Novita Sari

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Devi Novita Sari lahir pada tanggal 14 November 1992 di Yukum Jaya, Lampung Tengah. Penulis lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari Ibu Dessi Suprapti S.Pd dan Bapak Drs. Suharto.

Penulis memulai pendidikan di TK Pertiwi Bandar jaya pada tahun 1997 dan tamat pada tahun 1998. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di SD Kristen Bandar jaya kemudian pindah ke SD N 3 Yukum Jaya yang diselesaikan pada tahun 2004. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Terbanggi Besar dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di SMA N 1 Seputih Agung dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 penulis diterima di perguruan tinggi Universitas Lampung pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan ke Pasca Sarjana Universitas Lampung pada Jurusan Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung pada tahun 2017.

MOTTO

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri...”

(Qs: Ar- Ra'd Ayat 11)

“No action nothing happen. Take action miracle happen”

(Tung Desem Waringin)

“Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu-ibu yang cerdas akan menghasilkan anak yang cerdas.

(Devi Novita Sari)

“Sesudah Kesulitan pasti ada kemudahan,
You can when you believe, good is not enough.

Believe in yourself, you can do it”.

(Devi Novita Sari)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua yang paling aku sayang dan paling aku cinta Ibu Dessi Suprapti S.Pd dan Bapak Drs. Suharto yang selalu memberikan limpahan cinta dan kasih sayangnya yang tulus, dukungan do'a, moril, dan materi yang tak terbatas serta didikannya agar aku menjadi pribadi yang mandiri dan disiplin. Kakakku Deddy Setiawan Wicaksono dan adikku tercinta Daffa Zulvia Risnanda yang telah memberikan semangat dan perhatiannya. Serta semangat dan keinginan kerasku meraih gelar MAGISTE ILMU EKONOMI.

Almamater tercinta Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Tengah” Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Ekonomi pada Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Ekonomi;
3. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Utama tesis atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;

4. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Pendamping tesis atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;
5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si dan bapak Dr. Saimul, S.E., M.Si., selaku penguji utama ujian tesis. Terima kasih atas masukan dan saran-saran yang diberikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang telah memberikan ilmu dan pelajaran dengan baik.
7. Bapakku Drs. Suharto, yang paling ku sayang dan ku cinta yang tidak pernah lelah untuk mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta, semangat dan motivasi, berusaha dengan segenap daya upaya serta kesabaran untuk terciptanya keberhasilan masa depanku, semoga Allah SWT senantiasa selalu menyayangi dan mencintai beliau.
8. Kakakku Deddy Setiawan Wicaksosno dan adikku tercinta Daffa Zulvia Risnanda terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil selama ini.
9. Terima kasih kepada seluruh keluarga besarku atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini.
10. Sahabat-sahabat terbaikku yang berjuang bersama-sama. Sahabat tercinta, teman susah, senang, dan segalanya yang selalu saya repotkan dan merepotkan saya, pemberi semangat, doa, dan warna di kehidupan saya.

11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Ekonomi angkatan 2014. Terima kasih untuk kepeduliannya selama ini kak Aditya, kak Taufik, Ajo Fredy, kak Risky, kak Yoga. Semoga kedepannya kita akan selalu sukses amin.
12. Sahabat-sahabat SMA terbaikku yang selalu memberi dukungan di kala bahagia dan susah Eko Aprianto, Nopitek, Ayu Apong.
13. Staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta pegawai lainnya yang telah banyak membantu kelancaran proses penyelesaian tesis ini.
14. Beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih.
15. Almamater ku tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 04 Mei 2017

Penulis,

Devi Novita Sari

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4 . Kontribusi Penelitian	18
II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Teoristis.....	19
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	19
2.1.2 Pengeluaran Pemerintah	22
2.1.3. Peran Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi	39
2.1.4. Tenaga Kerja.....	44
2.1.5. Peran Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah	45
2.2. Penelitian Terdahulu	48
2.3. Kerangka Pikir	49
2.4. Hipotesis	55
III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Sumber Data	56
3.2. Operasional Varibel dan Pengukuran Variabel.....	56
3.3. Teknik Analisis	57
3.4. Pengolahan Data.....	58
3.5. Metode Analisis	58
3.6. Analisi elastiisitas	59
3.7. Pengujian Hipotesis	59
3.8. Uji Asumsi Klasik	62

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Induktif	65
4.1.1. Persamaan untuk pertumbuhan Ekonomi	65
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian Klasik	74
4.2.1. Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	74
4.2.2. Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ...	77
4.2.3. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	78
4.3. Gambaran Umum daerah Penelitian	82
4.3.1. Keadaan Wilayah	82
4.3.2. Keadaan Penduduk	82
4.3.3. Pertumbuhan Ekonomi	83
4.3.4. Pengeluaran Pemerintah	85
4.3.5. Tenaga Kerja	87

V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah	6
2. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	13
3. Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Tengah.....	15
4. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	73
5. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah	82
6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah.....	83
7. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Hasil Perhitungan Estimasi	L1
2. Hasil Uji Normalitas	L2
3. Hasil Uji Multikolinieraritas	L3
4. Hasil Uji Autokorelasi.....	L4
5. hasil Uji Heteroskedastisitas	L5
6. Total Peneluaran Pemerintah	L6
7. PDRB	L7
8. Pengeluaran Pemerintah	L8
9. Tenaga Kerja	L9

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam kerangka itu, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata (Raharjo, 2006).

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Widodo, 1990).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu

mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Rustiono, 2008). Menurut Sukirno (2000) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu; modal, tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2000).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusumo (1994) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasarana produksi.

Adapun pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu, karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Mankiw, 2003).

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung kepada jasa yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1999).

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah.

Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan

produktif para pelaku ekonomi. Salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan tersebut adalah dengan mendorong terciptanya iklim investasi yang baik. Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan, yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun pembangunan dan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (dan atau belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi.

Menurut Schumpeter dalam Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan *output* dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Lampung telah menerapkan berbagai kebijakan terutama yang berkaitan dengan pengeluaran pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan melakukan kebijakan belanja pembangunan dan belanja modal. Dengan kebijakan ini di harapkan akan mendorong sektor riil yang akan memacu produksi dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2014 mencapai Rp1.747.031 juta rupiah, terbesar untuk daerah kabupaten di Provinsi Lampung. Menduduki posisi kedua di Provinsi Lampung ialah kota Bandar Lampung yaitu Rp 1.981.969. Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten di Provinsi Lampung dengan pengeluaran pemerintah paling besar pada tahun 2014, mengalahkan Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara dan Kabupaten yang ada di Lampung lainnya.

Begitu pula dengan Tenaga kerja, Kabupaten Lampung Tengah memiliki tenaga kerja terbesar yaitu 619.792 bahkan mengalahkan Kota Bandar Lampung yang hanya 385.417 . Dengan demikian Kabupaten Lampung Tengah memiliki tenaga kerja terbesar di Provinsi Lampung.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Lampung Tengah memiliki Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah yakni 5,62 persen pada tahun 2014, jika di bandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada tahun yang sama sebesar 6.99 persen. Melihat potensi

yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah dapat di katakan Lampung Tengah sebenarnya dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Lampung.

Semestinya dengan besarnya pengeluaran pemerintah dan tingginya tenaga kerja di Kabupaten Lampung Tengah di bandingkan dengan wilayah Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Namun justru pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kab/Kota lain di Provinsi Lampung.

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat dalam Tabel 1

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
2001	5,62
2002	4,72
2003	5,61
2004	6,13
2005	5,17
2006	5,82
2007	6,20
2008	5,66
2009	5,94
2010	5,87
2011	5,75
2012	6,36
2013	3,37
2014	5,62
Rata-rata	5,56

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki rata-rata laju pertumbuhan ekonomi relatif rendah yakni sebesar 5,56 persen per tahun. Bahkan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun hingga 3,37 persen. Namun meningkat pada tahun 2014 hingga 5,62 persen.

Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja rutin dan belanja pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono,2005).

Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (Raharjo,2006).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna

substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan.

Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya (Raharjo,2006).

Menurut Todaro (1999 : 124-130) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) meliputi semua jenis investasi baru baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta yang ditanamkan dengan bentuk tanah, peralatan fisik, dan modal sumber daya. Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabungkan (diinvestasikan) kembali dengan tujuan untuk memperbesar *output* atau pendapatan di kemudian hari (Raharjo,2006)..

Akumulasi modal yang dilakukan oleh pemerintah menggambarkan seberapa besar peran pemerintah dalam sistem perekonomian suatu daerah. Samuelson dan Nordhous (1996:49-50) menyebutkan bahwa perekonomian yang ideal adalah

perekonomian yang menerapkan mekanisme pasar, artinya bahwa jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi wewenang pasar karena hanya mekanisme pasar yang mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Namun dalam hal-hal tertentu menunjukkan bahwa mekanisme pasar memiliki kelemahan yaitu gagal mencapai alokasi yang efisien disebabkan oleh adanya *common goods*, unsur ketidaksempurnaan pasar, barang publik, eksternalitas, *incomplete market*, kegagalan informasi, *unemployment* dan *uncertainty* (Raharjo,2006).

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung kepada jasa yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1999).

Todaro (1997:18) menyebutkan pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan yang lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Menurut Jones (1976:14) bahwa

infrastruktur (*social overhead capital*) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produksi output, tetapi infrastruktur memberikan peranan yang essential dalam aktivitas ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan di daerah selanjutnya akan lebih memilih mengadopsi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah itu sendiri, tentunya tuntutan pengenalan potensi daerah dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya.

Menurut Mangkoesoebroto (1998) Peranan pemerintah yang harus dijalankan adalah :

1. Peranan alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya.
2. Peranan distribusi yaitu pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal merubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan melalui pengenaan pajak progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi yang mampu dan meredistribusikan bagi yang kurang mampu.
3. Peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan.

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah merupakan bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat (Raharjo,2006).

Keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah menuntut adanya suatu kebijakan yang tepat dari pemerintah. Upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan pada kondisi dan item tertentu saja, karena secara umum upaya tersebut justru dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung masyarakat. Salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. (Raharjo,2006).

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja pembangunan karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial seperti jalan, jembatan dan pembangunan prasarana sektor-sektor ekonomi lainnya (Raharjo,2006).

Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan, belanja dibagi dalam dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, pengertian belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Belanja tidak langsung, yaitu Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan yaitu pembelanjaan (pembangunan dan rutin) dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan yaitu dengan pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output); 2) pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) dan investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal).

Pengeluaran belanja langsung merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Pengeluaran belanja tidak langsung pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah.

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 2001 hingga 2014 dapat di lihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 di tunjukkan bahwa perkembangan belanja langsung dari tahun 2001 sampai 2014 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 34,08 persen dari Rp. 19.402 pada tahun 2001 menjadi Rp. 353.488 pada tahun 2014 .

Sedangkan perkembangan belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 19,45 persen dari Rp. 216.487 pada tahun 2001 menjadi Rp1.393.543 pada tahun 2014.

Tabel 2. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

Tahun	Belanja Langsung (Juta Rp)	% Kenaikan	Belanja Tidak Langsung (Juta Rp)	% Kenaikan
2001	19.402	-	216.487	-
2002	24.138	24,40	284.015	31,19
2003	65.238	170,27	347.190	22,24
2004	105.248	61,32	304.106	-12,40
2005	127.333	20,98	216.287	-28,87
2006	177.292	39,23	405.267	87,37
2007	141.788	-20,02	535.909	32,23
2008	174.397	22,99	434.031	-19,01
2009	192.605	10,44	711.857	64,01
2010	141.670	-26,44	682.619	-4,10
2011	170.821	20,57	816.001	19,53
2012	378.394	121,51	895.156	9,70
2013	454.430	20,09	1.001.206	11,84
2014	353.488	-22,21	1.393.543	39,18
Rata-rata		34,08		19,45

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dihadapi oleh masyarakat yang tingkat pertumbuhannya masih rendah. Hal ini berarti bahwa kelebihan jumlah penduduk tidak seimbang dengan

faktor produksi lain yang tersedia dimana penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.

Selain pengeluaran pemerintah, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Tenaga kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

Pada Tabel 3, dapat dilihat jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan tenaga kerja dapat diserap oleh pasar kerja sejak tahun 2001 sampai 2014 di Kabupaten Lampung Tengah

Dari Tabel 3 di tunjukkan bahwa jumlah Tenaga kerja di Kabupaten Lampung Tengah yang dapat diserap oleh pasar kerja sejak tahun 2001 sampai 2014

sebesar 9,42 persen . Hal ini menunjukkan belum terserapnya secara maksimal Tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan potensi yang mungkin timbul dari besarnya tingkat perkembangan tenaga kerja yang belum bekerja adalah masalah keterbelakangan serta permasalahan sosial yang berakibat pada lambatnya prospek pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah.

Tabel 3. Pertumbuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 – 2014

Tahun	Tenaga kerja	% Kenaikan
2001	219.865	-
2002	279.876	27,29
2003	345.260	23,36
2004	507.329	46,94
2005	541.503	6,73
2006	521.205	-3,74
2007	493.533	-5,30
2008	560.324	13,53
2009	517.267	-7,68
2010	631.320	22,04
2011	552.750	-12,44
2012	588.296	6,43
2013	585.425	-0,48
2014	619.792	5,87
	Rata-rata	9,42

Sumber: BPS, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2001 – 2014

Melihat fenomena dari Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki pertumbuhan ekonomi berfluktuatif yang berakibat pada rendahnya pendapatan perkapita penduduknya, belum maksimalnya Tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar kerja maka kiranya perlu diteliti lebih mendalam tentang pengaruh yang timbul dari pengeluaran pemerintah dan Tenaga kerja serta implikasinya pada pertumbuhan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

2.1. Permasalahan Dalam Penelitian

1. Bagaimana pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah

1.4. Kontribusi Penelitian :

1. Secara akademis, diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam
3. menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. "pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ekonom Klasik, Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (lihat Arsyad,1999). Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga :

1. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat dimana jumlah sumber daya alam

yang tersedia mempunyai batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian.

2. Sumber daya insani (jumlah penduduk) merupakan peran pasif dalam proses pertumbuhan output, maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja.
3. Stok modal merupakan unsur produksi yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan output.

Laju pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi (Sukirno, 2000). Persamaannya adalah :

$$Y = f (K, L, T)$$

Y = tingkat pertumbuhan ekonomi

K = tingkat penambahan barang modal

L = tingkat penambahan tenaga kerja

T = tingkat penambahan teknologi

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Solow Neo Classical Growth Model*) maka fungsi produksi agregat standar adalah sama seperti yang digunakan dalam persamaan sektor modern Lewis yakni:

$$Y = A e^{\lambda t} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha}$$

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

λ = melambangkan tingkat kemajuan teknologi

α = melambangkan elastisitas output terhadap modal, yakni

persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia. Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

2.1.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran yang

menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah, dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan.

Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rician belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

Pengeluaran Pemerintah Dilihat dari Belanja Langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk

pembangunan fisik dan non fisik. Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

Belanja langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

1. Pengertian Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung

Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan, belanja dibagi dalam dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, pengertian belanja langsung dan tidak langsung bisa anda lihat dibawah ini.

Belanja Langsung atau disingkat BL, yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi.

Contoh Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Honor, insentif merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan organisasi)

Belanja Tidak Langsung atau disingkat BTL , yaitu Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi.

Agar lebih jelas lagi, khususnya bagi Anda yang baru bekerja di. Pemerintahan, saya akan menambahkan jenis belanja lain yang terkait dengan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

- Belanja pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- Belanja barang adalah dana yang di sediakan/ dialokasikan dalam DIPA untuk pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas
- Belanja modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya.
- Belanja lainnya adalah dana yang disediakan/ dialokasikan dalam DIPA yang di gunakan/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam jenis belanja. Kiranya sekarang anda sudah memahami apa Pengertian dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Good Job

2. Perbedaan Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung (BTL) terdapat apa yang di namakan dengan Belanja Pegawai. Mungkin cukup membingungkan Anda untuk membedakan keduanya. Untuk itu terlebih dahulu kita mengetahui pengetiaannya serta contohnya dilapangan.

BL : Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Honor : merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai , tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi)

BTL : Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Gaji. (Mau kerja atau tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas).Dengan demikian Anda bisa memahami perbedaan yang mendasar antara keduanya. Semoga bisa dipahami.

2.1. Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- **Belanja pegawai** merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Belanja bunga** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- **Belanja subsidi** digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
- **Belanja hibah** bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- **Bantuan sosial** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- **Belanja bagi hasil** digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Bantuan keuangan** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- **Belanja tidak terduga** merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.2. Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- **Belanja pegawai**, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- **Belanja barang dan jasa** digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- **Belanja modal** digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap

lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Teori Pengeluaran Pemerintah Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Teori Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pendapat Peacock dan Wiesman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick Lindahl. Lindahl berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat dengan tarif pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur maka pemerintah memberlakukan tarif pajak sesuai dengan kemampuan

masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pajak yang diberlakukan kepada masyarakat berbeda-beda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap sama dengan pemberlakuan tarif pajak yang sama kepada masyarakatnya.

a. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

1) Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono,1999)

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar.

Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi

swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\underline{PPkP} < \underline{PkPPn} < .. < \underline{PkPPn}$$

PPK1

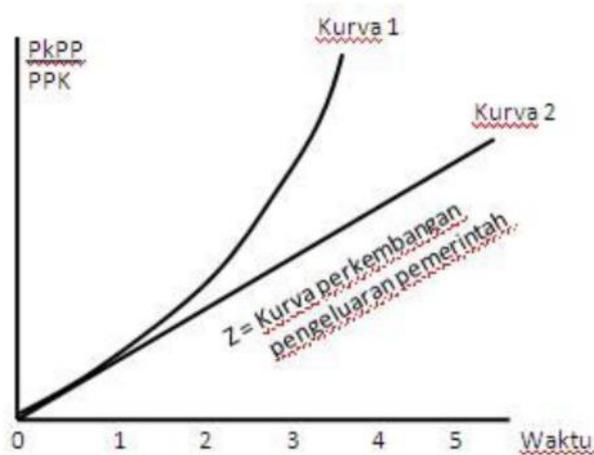
PPK2

PPKn

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)



Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

c. Teori Peacock dan Wiseman

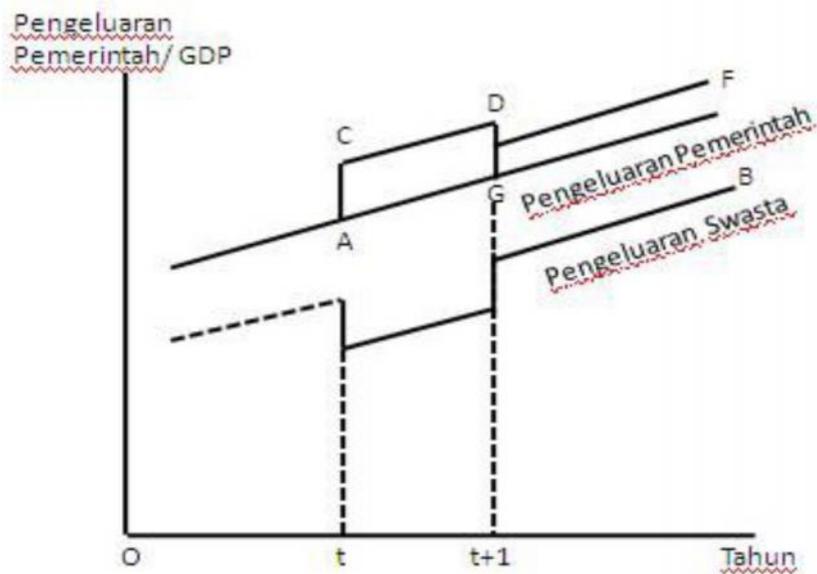
Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan

mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

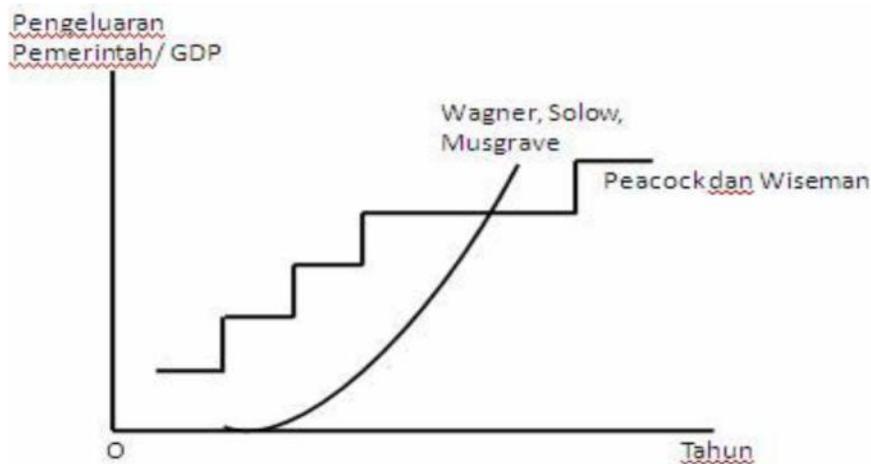
Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga.

Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini



Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.



Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa

meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

d. Teori Batas Kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate.

Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.3. Peran Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa pertanyaan yang sering di diskusikan mengenai peranan sektor publik dalam perekonomian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan

mengapa peranan sektor publik diperlukan dan apa peranan sektor publik dalam sistem perekonomian. Menurut Musgrave (1989) ada beberapa premis yang diterima secara umum dalam masyarakat bahwa 1) komposisi *output* yang ada seharusnya berada dalam garis yang sesuai dengan preferensi konsumsi individu dalam masyarakat, dan bahwa 2) preferensi tersebut digunakan untuk di desentralisasikan dalam membuat keputusan mengapa seluruh perekonomian tidak dipegang oleh swasta.

Sebuah perekonomian ideal, yang kompetitif sempurna dimana pengaturan alokasi sumberdaya berasal dari pertukaran sukarela antara barang dan uang pada harga pasar akan menghasilkan kuantitas maksimum barang dan jasa dari segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Kenyataan yang ada, pasar tidak selalu hadir dalam wujudnya yang ideal. Perekonomian pasar seringkali terlilit polusi dan monopoli seiring dengan melonjaknya inflasi atau pengangguran dan pada prakteknya pula bahwa distribusi pendapatan dalam masyarakat *Laissez-faire* sangat tidak merata. Untuk mengatasi kelemahan tersebut pemerintah mengambil peranan penting dalam perekonomian.

Menurut Adam Smith dalam Mangkoesubroto (1998), mengemukakan bahwa dalam perekonomian kapitalis, setiap individu yang paling tahu apa yang paling baik bagi dirinya, sehingga dia akan melaksanakan apa yang dianggap terbaik bagi dirinya sendiri. Setiap individu akan melaksanakan aktivitas yang harmonis seakan-akan diatur oleh *invisible hand*. Karena itu perekonomian dapat berkembang maksimum. Sehingga Adam Smith mengatakan bahwa peran

pemerintah hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta, yaitu melaksanakan peradilan, pertahanan/keamanan, dan pekerjaan umum.

Sedangkan menurut Samuelson (1997) secara garis besar pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yakni meningkatkan efisiensi, menciptakan keadilan dan melaksanakan kebijakan stabilisasi pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran serta nilai tukar.

Menurut Hyman dkk (1996); dalam sistem ekonomi negara campuran (mixed economy) pemerintah hanya menyediakan jumlah barang dan jasa tertentu (publik good) yang tidak dapat disediakan oleh swasta serta mengatur alokasi perorangan.

Menurut Mangkoesubroto (1998) Barang publik adalah beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas. Barang publik mempunyai ciri-ciri : 1) tidak bersaing (non rival in consumption) yaitu konsumsi dari seseorang tidak menyebabkan menurunnya kemanfaatan oleh individu lainnya; 2) tidak dapat dikecualikan (non excludability), artinya tidak seorangpun konsumen dapat dilarang dalam memanfaatkannya. Barang dan jasa yang diproduksi pemerintah tersedia dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang/jasa yang relatif murah karena harganya ditentukan rendah oleh pemerintah (subsidi), Sukanto R (2001)

Pada sistem perekonomian campuran, pemerintah berpartisipasi dalam pasar sebagai pembeli barang dan jasa. Pemerintah membeli input dari rumah tangga dan mendapatkan hak kepemilikan dari sumber produktif (modal dan tanah). Pemerintah menggunakan input untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak dijual kepada sektor rumah tangga dan perusahaan, tetapi disediakan melalui distribusi tanpa melalui pasar. Namun demikian pemerintah juga memiliki dan menjalankan perusahaan, seperti jasa pelayanan pos, kereta api dan lain-lain. Untuk membayar barang dan jasa yang dipergunakannya, pemerintah mendapatkan pemasukan dari perusahaan dan rumah tangga, seperti hasil\ pembayaran pajak, retribusi, royalti dan fee. Pemerintah menggunakan sumber daya yang produktif untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk pertahanan, jalan, sekolah dan jasa-jasa lainnya.

Kebijakan makroekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada pada saat itu. Menurut Sadono S (2000) persoalan pokok dalam perekonomian adalah : 1) pengangguran; 2) Inflasi; 3) keleluasan pertumbuhan ekonomi; 4) ketidakstabilan neraca pembayaran. Bentuk utama dari kebijakan fiskal pemerintah adalah dengan menambah pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak pendapatan.

Penambahan pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) meminjam dari masyarakat melalui pasar modal (loanable fund); dan 2) meminjam dari bank sentral melalui pencetakan uang baru. Penurunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan : 1) menurunkan sejumlah pajak tertentu; dan 2) menurunkan persentase pajak pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat-Prop-Kab/Kota). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintah ini dapat mempunyai keputusan akhir proses pembuatan yang berbeda, dan hanya beberapa hal pemerintah yang dibawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintahan yang lebih tinggi (Lee Robert D, Jr and Ronald W. Johnson)

Menurut Mangkoesubroto (1998;169) Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2.1.4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupu mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak,1985).

Lewis dalam Mulyadi (2003) mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja disektor lain.

Selanjutnya Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan).

Sektor informal mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada selama berlangsungnya proses industrialisasi, sehingga disebut katub pengaman ketenagakerjaan. Dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja disektor industri (sektor modern) oleh sektor informal, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Peningkatan upah ini akan mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga kelebihan penawaran pekerja tidak menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan, dengan asumsi perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak pernah menjadi terlalu banyak.

2.1.5. Peranan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 10 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (Simanjuntak, 1985 : 45)

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai tenaga kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, tenaga kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah tidak terbatas. Dalam keadaan demikian, peranan tenaga

kerja mengandung sifat elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern.

Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang bersamaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga produktif. Dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja diharapkan akan meningkatkan produksi, yang berarti akan meningkatkan pula PDRB.

Menurut Nicholson W (1991) bahwa suatu fungsi produksi pada suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja memperlihatkan jumlah maksimum sebuah barang / jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L , maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (*marginal physical product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain

dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan *output*, namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan *output* sertasetelah mencapai tingkat keluaran maksimum setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi keluaran.

Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk dan angkatan kerjasecara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacupertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti ukuran pasardomestiknya lebih besar. Meskipun demikian, hal tersebut masih dipertanyakan,apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pertumbuhan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tenaga kerja dan akumulasi modal, dan tersedianya input dan faktor produksi penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia, maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total produksi di suatu daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Deddy Rustiono (2008)	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkatan Kerja (AK) di Jawa Tengah pada masa sesudah krisis menurun disebabkan karena semakin sempitnya lapangan kerja yang tersedia, sehingga produktivitas tenaga menjadi tidak optimal dalam menghasilkan output. 2. pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi relatif meningkat pada saat terjadi krisis sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif untuk mendorong kenaikan permintaan agregat.
2.	Adi raharjo (2006)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus Di Kota Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis mengenai pengaruh belanja rutin pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan 2. Analisis mengenai pengaruh belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menunjukkan hasil yang positif namun tidak signifikan. 3. Berdasarkan besaran yang dihasilkan oleh variabel angkatan kerja, dapat dijelaskan bahwa angkatan kerja di Kota Semarang menjadi variabel yang mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan, berdasarkan hasil pengamatan hal ini disebabkan karena angkatan kerja yang ada di Kota Semarang didominasi oleh pekerja yang tidak mempunyai tingkat keterampilan yang memadai sehingga meskipun jumlahnya banyak namun kurang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
3.	Tommy Prio Haryanto (2012)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa	Hasil dari penelitian ini adalah koefisien positif dari belanja tidak langsung adalah 0.291399 yang berarti jika belanja tidak langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik 0.291399%. Koefisien positif dari belanja langsung sebesar 0.117470 yang

		Tengah Tahun 2007-2011	berarti jika belanja langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,117470%.Belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	I Gede Dwi Purnama Putra dan I Made Adigorim	Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Dari hasil penelitian mengenai pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan uji F-statistik (uji simultan) didapati bahwa secara bersamasama belanja langsung dan belanja tidak langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB kabupaten Badung. Berdasarkan uji t-statistik (uji parsial) didapati bahwa variabel belanja langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten Badung pada tingkatkepercayaan 95%. Sedangkan variabel belanja tidak langsung memiliki pengaruh
5.	Lili Masli	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jawa barat periode 1993-2006 menunjukkan arah yang negatif di dibandingkan dengan awal periode penelitian. 2. Perhitungan data PDRB tahun 1993-2006, dengan menggunakan indeks Williamson dan indeks Entropi Theheil cenderung meningkat.

2.3. Kerangka Berpikir

Sebagaimana dalam konteks negara, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam kerangka mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat dihadapi oleh pasar yaitu dalam hal penyediaan barang-barang publik. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

guna tercapainya pendapatan perkapita masyarakat. Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan bukanlah semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan (Raharjo, 2006).

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan yaitu pembelanjaan (pembangunan dan rutin) dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan yaitu dengan pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output); 2) pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) dan investasi pemerintah (belanja pembangunan/barang-barang modal).

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Pengeluaran rutin pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah.

Pertumbuhan tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jadi meningkatnya tenaga kerja akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Di

samping itu peranan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung akan menaikkan total output, menurut Lin (1994) mengatakan ada sesuatu yang penting yang sejalan dengan peran pemerintah dimana pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan.

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondisi studi kasus daerah atau negara yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Rustiono (2008) yang didalam tesisnya membahas pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang yang menyatakan peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat . Hasil yang didapat adalah faktor tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2006) bahwa variabel pengeluaran pemerintah (rutin) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah 10 % akan tetapi variabel pengeluaran pemerintah (pembangunan) dan angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi swasta dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna

tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Penelitian Barak (2014) bahwa Belanja tak langsung memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi anggaran belanja tak langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja tak langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin kecil. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka dalam penyusunan anggaran belanja tak langsung haruslah tepat sasaran. Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Belanja langsung yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal memang sangat terasa bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena sifatnya yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah pembangunan jalan raya kabupaten, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Belanja langsung juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa semakin tinggi anggaran belanja langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin kecil.

Penelitian lainnya yang dilakukan Utami (2007) baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel pengeluaran rutin pemerintah mempunyai

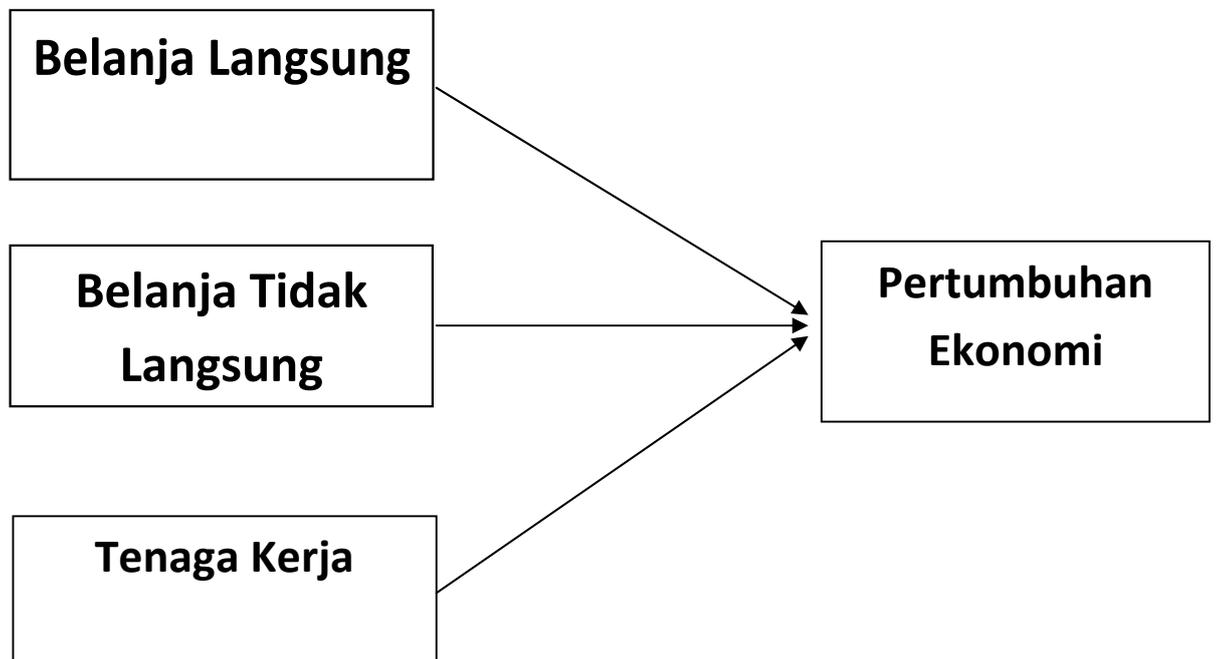
pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada periode penelitian pengeluaran rutin pemerintah bersifat tidak produktif dan sebagian besar didominasi oleh pengeluaran untuk pembayaran cicilan dan bunga utang. Dengan demikian pemerintah harus lebih fokus untuk mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan terhadap utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan surplus anggaran agar dapat digunakan untuk mengurangi jumlah cicilan dan bunga utang demi tercapainya kesinambungan fiskal. Sedangkan pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena pengeluaran pembangunan pemerintah lebih mengarah kepada investasi. Akan tetapi pada jangka panjang pengaruhnya tidak signifikan karena adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaannya.

Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan utang, subsidi, serta pengeluaran rutin lainnya. Jika pengeluaran rutin tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena adanya peningkatan konsumsi akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan atas dan meningkatkan pendapatan nasional, sehingga pada selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Utami (2007) .

Utami (2007) juga mengungkapkan Pekerja memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun

jangka panjang. Hal ini dikarenakan pekerja merupakan salah satu faktor penting dalam produksi barang dan jasa, sehingga dapat mendorong peningkatan pada output yang selanjutnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Dari Uraian di tadi dapat digambarkan secara skema alur kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

2.4. **Hipotesis**

Dari Uraian latar belakang serta rumusan masalah, penulis memunculkan hipotesis dalam penelitian, yaitu :

1. Diduga Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah
2. Diduga Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah
3. Diduga Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah

III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu berupa data kuantitatif yang meliputi data Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi. Data dalam penelitian ini di peroleh dari Badan Pusat Statistik Lampung Tengah yang berkaitan dengan variabel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah jenis data rangkai waktu (time series) yang disusun ke dalam bentuk data tahunan dalam periode 2001 sampai dengan 2014 sehingga penelitian ini merupakan hasil penggunaan data seri selama periode tertentu.

3.2. Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Untuk memberi Pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel penelitian, maka variabel-variabel tersebut di definisikan secara operasional dan diukur sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah daerah adalah realisasi total belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dinyatakan dalam satuan Rupiah. Dalam penelitian ini Pengeluaran Perintah meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam juta rupiah.

2. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003) di Kabupaten Lampung Tengah, dinyatakan dalam satuan orang. Dalam penelitian ini Tenaga Kerja dalam satuan jiwa.
3. Pertumbuhan Ekonomi adalah Perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari selisih antara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada saat ini dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini. Dalam penelitian ini pertumbuhan Ekonomi di proksi dalam PDRB harga konstan tahun 2000. Dalam penelitian ini PDRB dalam juta rupiah.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan secara rinci tentang Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Tenaga Kerja dan pertumbuhan ekonommi.
2. Analisis Kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh Belanja Langsung, Belanja

Tidak Langsung dan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara perhitungan matematis dan angka-angka statistik

3.4. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan program komputer yaitu dengan menggunakan program E-Views 6.1.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, dimana rumusnya:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 BL_t + \beta_2 BTL_t + \beta_3 TK_t + e$$

Keterangan :

Y_t = PDRB (Rp)

BL_t = Belanja Langsung pada tahun t (Rp)

BTL_t = Belanja Tidak Langsung pada tahun t (Rp)

TK_t = Tenaga Kerja pada tahun t (Jiwa)

α = Konstan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = Kesalahan Penggunaan

3.6. Analisis Elastisitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat kepekaan variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan, dimana rumusnya:

$$E_{BL} = \frac{\partial PDRB}{\partial BL} \cdot \frac{\overline{BL}}{\overline{PDRB}} \dots\dots\dots(1)$$

$$E_{BTL} = \frac{\partial PDRB}{\partial BTL} \cdot \frac{\overline{BTL}}{\overline{PDRB}} \dots\dots\dots(2)$$

$$E_{TK} = \frac{\partial PDRB}{\partial TK} \cdot \frac{\overline{TK}}{\overline{PDRB}} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

E_{BL}, E_{BTL}, E_{TK} = Elastisitas Variabel independen

$\partial BL, \partial BTL, \partial TK$ = Delta Variabel independen

$\partial PDRB$ = Delta Variabel Dependen

$\overline{BL}, \overline{BTL}, \overline{TK}$ = Rata-rata Variabel independen

\overline{PDRB} = Rata-rata Variabel Dependen

3.7. Pengujian Hipotesis

Secara statistik, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dengan nilai statistik t, nilai statistik f, serta koefisien determinasi.

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2005).

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2005). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).

b. Pengujian Simultan (Uji statistik F)

Untuk mengetahui peranan variable bebas secara keseluruhan dilakukan dengan uji F. Kesimpulan uji F dapat diperoleh dengan membandingkan antara F statistik dengan F tabel pada tingkat tertentu dan derajat bebas tertentu (Gujarati, 1997:121). Pengujian ini dilakukan dengan rumus :

$$F = \frac{ESS / K}{RSS / (N - K - 1)}$$

1. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, berarti secara bersama-sama variable bebas berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel terkait.

2. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, berarti secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh secara nyata dan signifikansi terhadap variabel terikat. Di dalam penelitian ini nilai uji F dilihat dari tingkat signifikansi pada hasil pengolahan data.

c. Pengujian Parsial (Uji Statistik t)

Uji t merupakan suatu pengujian secara statistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi masing-masing variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pengujian hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan dengan uji t (*t student*). Untuk variabel bebas desentralisasi fiskal akan dilakukan uji satu arah pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Derajat kebebasan yang digunakan adalah $df = n - k - 1$, dimana n = jumlah observasi dan k = jumlah variabel bebas yang digunakan.

Hipotesis yang digunakan adalah :

- 1) $H_0 : \beta_1 = 0$: Belanja Langsung tidak berpengaruh terhadap PDRB
 $H_a : \beta_1 > 0$: Belanja Langsung berpengaruh positif terhadap PDRB
- 2) $H_0 : \beta_2 = 0$: Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh terhadap PDRB
 $H_a : \beta_2 > 0$: Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap PDRB
- 3) $H_0 : \beta_3 = 0$: Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap PDRB
 $H_a : \beta_3 > 0$: Tenaga Kerja berpengaruh positif terhadap PDRB

Apabila : $t_{hitung} < t_{tabel}$: H_0 diterima dan H_a ditolak

$t_{hitung} > t_{tabel}$: H_0 ditolak dan H_a diterima

3.8. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi factor gangguan (*residual*) . Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat *normal probability plot* yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang *perfect atau exact* di antara beberapa atau semua variable bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bias dideteksi keberadaannya bila R^2 dari auxiliary regression melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai *varian inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas .

Multikolinieritas dapat dideteksi dengan besaran-besaran regresi yang didapat, yaitu :

- 1) Variasi besar (dari taksiran OLS)
- 2) Interval kepercayaan lebar (karena variasi besar, maka standar error besar sehingga interval kepercayaan lebar)
- 3) Uji-t tidak signifikan. Suatu variabel bebas secara substansi maupun secara statistik jika dibuat regresi sederhana bias tidak signifikan karena variasi besar akibat kolinieritas. Bila standar error terlalu besar, maka besar pula kemungkinan taksiran koefisien regresi tidak signifikan
- 4) R^2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari t-test
- 5) Terkadang nilai taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data *cross section* dari pada *timeseries*. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan metode grafik *scatter plot*, uji White, dimana apabila nilai probabilitas (p value) observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Hipotesis untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas :

Ho : $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \dots = \epsilon_q = 0$ maka tidak ada heteroskedastisitas

Ha : $\epsilon_1 \neq \epsilon_2 \neq \dots \neq \epsilon_q \neq 0$ maka ada heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data cross section). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistic (d) dengan dL dan dU, jika DW statistic berada diantara dU dan 4-dU maka tidak ada autokorelasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa belanja langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh belanja tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.2. Saran

1. Belanja langsung tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokasi pengeluaran daerah.
2. Belanja tidak langsung signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meninjau kembali alokasi pengeluaran daerah.

3. Tenaga kerja signifikan terhadap pertumbuhan, di harapkan pemerintah daerah Lampung Tengah meningkatkan kualitas tenaga kerja, misalnya dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Raharjo 2006. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1982-2003 (Studi Kasus di Kota Semarang)*, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Arif Barak Wibisana, 2014, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2001-2010*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember
- Arndt, H. W., 1983, *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru*, P3ES, Jakarta
- Aschauer, DA, 1989, *Public Investment and Productivity Growth in The Group of Seven, Economic Perspective*, 13.
- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : Penerbit BPFE : 1988
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomis seri sinopsis*, Edisi Pertama, Cetakan keenam, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2003, *Kota Semarang Dalam Angka Tahun*, (berbagai tahun penerbitan, BPS Kota Semarang..
- Badan Pusat Statistik. 2001-2014. *Indikator Ekonomi*. Badan Pusat Statistik, Lampung Tengah.
- Badan Pusat Statistik.2001-2014. *Laporan Perekonomian Lampung Tengah*. Badan Pusat Statistik, Lampung Tengah
- Badan Pusat Statistik 2001-2014. *Pengeluaran Pemerintah Lampung Tengah*. Badan Pusat Statistik, Lampung Tengah
- Badan Pusat Statistik.2001-2014. *Proyeksi Angkatan Kerja Lampung Tengah*. Badan Pusat Statistik, Lampung Tengah
- Deddy Rustiono, 2003. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah*, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.

- Diyah Utami , 2007, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 1975-200*. Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
- Djojohadikusuma S, 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga, Jakarta
- Efrizal Hasan, Syamsul Amar, Ali Anis, 2010. *Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Barat*.
- Heston Pero Hutabarat, 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- I Gede Dwi Purnama Putra, I Made Adigorim., 2010. *Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Jones, BM, 1996, *Local Government Financial Management*, Hertfordshire : ICSA Publishing
- Kim, Sung Tai. 1997. "The Role of Local Public Sectors in Regional Growth in Korea", *Asian Economic Journal*, Vol. 11 No. 21, 155-168.
- Kweka, J. P. dan O. Morissey. 2000. "Government Spending and Economic Growth in Tanzania, 1965-1996". *Credit Research Paper*, 00/6: 1-37.
- Lee, Robert D and Ronald W Johnson, 1998, *Public Budgeting System 6th Edition*. AN Asper Publication Gaithering Maryland.
- Lincoln Arsyad, 1999, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta, BPFE-UGM
- Nur saidah , 2011. *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal*. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.

- Mankiw, N Gregory, 2003. *Macroeconomics*, Fourth Edition, Worth Publisher, Inc., New York
- Nicholson, W, 1994. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*, Rajawali Pers.
- Sadono Sukirno, 2000, *Makroekonomi Modern*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Simandjuntak, DJ Isman, S, 1985, *Persoalan Pokok Sehubungan dengan Hutang Luar Negeri Indonesia*, Seminar di UAJ Yogyakarta
- Sodik, J. 2007. "Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12 (1): 27-36. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Triyanto Suseno Widodo, 1990. *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Todaro, Michael P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Terjemahan, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol.02, Universitas Gajah Mada, 2005